

Peran Pinjaman *International Monetary Funding* (IMF) Untuk Perekonomian Indonesia Pada Sistem Standar Moneter

Muhammad Luis¹, Yasirwan², Imsar³

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Mhd.Luis123@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Yasirwan46@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Imsar@uinsu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 01/10/2023

Revised : 05/10/2023

Accepted: 09/10/2023

Key words:

IMF, Indonesia, Pinjaman Luar Negeri

DOI:

[Doi.org/10.37366/jespb.v8i02.1035](https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.1035)

ABSTRACT

The International Monetary Fund was formed at the time of the United Nations meeting in the United States in 1944 at Bretton Woods (New Hampshire). This organization is in an international association which handles financial problems. The economic crisis hit Indonesia during President Soeharto's leadership, at that time Soeharto officially asked the International Monetary Fund for assistance in resolving the monetary and economic crisis. that from the results the researcher aims to provide further information in order to find maximum results from the previous analysis that has been carried out. The research method in this journal article is to use a qualitative method, by taking article sources through several journal references. Then the researcher inspected it and put the thoughts from the identification into this almost perfect journal. Because researchers want to clarify more about the role of international monetary fund loans in the Indonesian economy, which is based on the international monetary standard system. The research results show that the assistance provided by the International Monetary Fund only adds to the country's disasters, especially for the poor. Because Indonesia continues to carry out cooperative activities with the International Monetary Fund, because the country is still unable to pay off its debts, and it is impressed by the state's actions such as (digging holes and covering holes) in paying and paying off its debts.

ABSTRAK

Internasional Monetary Fund di bentuk pada saat masa pertemuan Perserikatann Bangsa-Bangsa, di Amerika serikat pada tahun 1944 di Bretton Woods (New Hampshire). Organisasi tersebut berada dalam gabungan internasional yang merupakan penugasan terhadap permasalahan keuangan. Krisis ekonomi melanda Indonesia saat masa kepemimpinan presiden Soeharto, saat itu Soeharto secara resmi meminta bantuan dalam menyelesaikan masalah krisis moneter dan ekonomi kepada Internasional Monetary Fund. bahwa dari hasil peneliti bertujuan guna memberikan keterangan lebih lanjut agar dapat menemukan hasil yang maksimal dari analisis terdahulu yang telah di lakukan. Adapun Metode penelitian pada artikel jurnal ini adalah dengan menggunakan metode Kualitatif, dengan mengambil sumber-sumber artikel melalui beberapa jurnal referensi. Kemudian peneliti mengidentifikasinya dan menuangkan hasil pemikiran dari identifikasi tersebut menjadi hasil jurnal yang hampir sempurna ini. Sebab peneliti ingin memperjelas lagi mengenai bagaimana Peran Pinjaman Internasional Monetary Fund Terhadap Perekonomian Indonesia yang di dasarkan pada sistem standar moneter internasional. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan yang di berikan Internasional Monetary Fund hanya menambah bencana negara, terkhusus untuk masyarakat miskin. Sebab Indonesia terus menerus melakukan kegiatan kerjasama bersama Internasional Monetary Fund, karena masih belum mempunya negara melunasi hutang tersebut, dan terkesan tindakan negara seperti (gali lubang dan tutup lubang) dalam membayar dan melunasi hutang-hutangnya terhadap tersebut.

1. PENDAHULUAN

Internasional Monetary Fund ialah sebuah organisasi yang didirikan pada masa awal

berakhirnya saat masa perang dunia yang Ke-Dua. Di mana *Internasional Monetary Fund* organisasi yang tercipta yang merupakan bagian penting dari

organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Internasional Monetary Fund* mengidentifikasi uang yang telah disimpan oleh setiap individu yang telah mengalami krisis kepercayaan. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari ketidak stabilan ekonomi regional dan global dengan berfokus pada uang. Selain itu, *Internasional Monetary Fund* menawarkan jaminan berkualitas tinggi untuk tujuan pinjaman (Gunawan, 2021). Hal tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk menganalisis sistem keuangan internasional salah satu anggota, menentukan profitabilitas ekonomi anggota agar dapat beroperasi secara efisien, dan juga menentukan kepatuhan setiap anggota untuk meningkatkan kualitas keuangan. Kewajiban serta kepatuhan bertujuan agar terpenuhinya tujuan utama dari *Internasional Monetary Fund*. Selain melakukan penelitian di negara tertentu, *Internasional Monetary Fund* juga melakukan penelitian tentang kebijakan ekonomi global, regional, dan domestik, serta penelitian tentang kebijakan ekonomi domestik. Partisipasi *Internasional Monetary Fund* dalam pembangunan ekonomi negara terhambat oleh kehadiran banyak anggota yang telah digalang. *Internasional Monetary Fund* bertugas menganalisis situasi ekonomi negara untuk menetapkan garis dasar yang dapat digunakan oleh sejumlah pemangku kepentingan yang berbeda untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kualitas hidup para pemangku kepentingan tersebut. Memang benar bahwa *Internasional Monetary Fund* belum mampu menyelesaikan masalah, namun mampu mempererat hubungan kedua kelompok tersebut (Muhammad Rafi Darajati, 2020).

Di temukan penulis dari hasil yang di teliti melalui pengkaji terdahulu menurut Granito Nugraha bahwa *Internasional Monetary Fund* memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap anggota-anggotanya sebab *Internasional Monetary Fund* banyak memberikan keuntungan baik dari segi pemberian dana maupun mengawasi sistem standar moneter setiap anggotanya agar berjalan secara efektif (Nugraha, 2019). Melan Febrianti Sofyan menyebutkan bahwa *Internasional Monetary Fund* memiliki pengaruh dalam penerapan di negara Indonesia yang cukup tidak

menguntungkan sebab di simpulkan bahwa adanya *Internasional Monetary Fund* membuat negara mengalami kesengsaraan sebab sulitnya untuk melunasi hutang pinjaman tersebut kepada *Internasional Monetary Fund* (Sofyan & Yogyakarta, 2022).

Berdasarkan hasil pengkaji terdahulu mengenai Peran Pinjaman *Internasional Monetary Fund* Untuk Perekonomian Indonesia pada sistem Standar Moneter Internasional, bahwa dari hasil peneliti bertujuan guna memberikan keterangan lebih lanjut agar dapat menemukan hasil yang maksimal dari analisis terdahulu yang telah di lakukan.

2. KAJIAN TEORI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pembentukan Struktur teori guna menjelaskan *Internasional Monetary Fund* sebagai organisasi dunia perekonomian yang dimana telah bersatu pada sistem keuangan serta sistem standar moneter internasional dalam waktu yang lama (Culpepper, 2015). *International Monetary Fund* ialah organisasi dunia yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Internasional Monetary Fund* muncul ketika masa konferensi moneter dan keuangan PBB yang di selenggarakan pada 1 sampai 22 Juli 1944 di kota Bretton Woods, New Hamphsire, Amerika Serikat. Kumpulan tersebut dihadiri total 44 negara dengan tujuan guna membuat struktur ekonomi internasional agar membatasi terjadinya devaluasi mata uang kompetitif dimana berakibatkan Depresi Besar (*Great Depression*) pada periode 1930-an (Pamungkas et al., 2019).

Internasional Monetary Fund secara sah di bentuk pada tanggal 27 Desember 1945 yan melalui tahap 29 tanda tangan negara. Namun, ada 35 negara yang di juluki sebagai *founding father* berasal dari *Internasional Monetary Fund*, mereka adalah negara yang bertanda tangan dalam anggaran dasar pada yaitu pada tanggal 31 Desember 1945. *Internasional Monetary Fund* memulai kinerjanya pada saat tanggal 1 Maret 1947, dengan persiapan-persiapan yang cukup matang termasuk dalam proses di DPR serta Kongres dari masing-masing negara anggota (Fischer, 1998). *Internasional Monetary Fund* dibentuk sebagaimana memiliki dua

fungsi utama yaitu pertama, memantau ketekunan negara anggota dalam melakukan program peraturan serta ketentuan utama dalam melaksanakan perdagangan serta keuangan internasional yang mereka sepakati bersama. Yang Ke dua, yaitu *Internasional Monetary Fund* memfasilitasi kredit serta dana segar untuk negara-negara yang mengalami masalah pembayaran perekonomian (Clift, 2001). Pertolongan *Internasional Monetary Fund* diajukan melalui syarat, negara yang meminta bantuan kepadanya harus sepakat terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Perjanjian negara untuk melaksanakan kebijakan tertentu disebut dengan persyaratan kebijakan. Pada program itu telah disampaikan oleh dewan *Internasional Monetary Fund* yang diberitahukan melalui suatu *letter of intent* kemudian digabungkan dalam bentuk nota kesepemahaman (*Memorandum of Understanding*) (Aziza et al., 2019).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada artikel jurnal ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil sumber-sumber artikel melalui beberapa jurnal referensi. Kemudian peneliti mengidentifikasinya dan menuangkan hasil pemikiran dari identifikasi tersebut menjadi hasil jurnal yang hampir sempurna ini. Sebab peneliti ingin memperjelas lagi mengenai bagaimana Peran Pinjaman *Internasional Monetary Fund* Terhadap Perekonomian Indonesia yang didasarkan pada sistem standar moneter internasional. Metode kualitatif yang dimana dapat dipengaruhi melalui paradigma naturalistik-interpretatif Weberian (Cresswell, 1994). Pada gaya penelitian kualitatif mengembangkan realita serta maknanya. Sehingga, peneliti kualitatif pada dasarnya sangat memperhatikan proses serta peristiwa. Serta dalam penelitian kualitatif datangnya penilaian pada penelitian bersifat terbatas dalam situasi, serta melibatkan subjek yang relatif rendah. Sehingga umumnya dapat dilakukan analisa tematik (Densin & Lincoln, 2009).

Penelitian kualitatif secara konsep befokus pada banyak metode-metode, dengan demikian digunakannya metode-metode beragam agar

mencerminkan guna memiliki pemahaman yang dalam terhadap objek yang diteliti (Densin & Lincoln, 2009). Penelitian kualitatif ialah unsur dalam penelitian guna memahami kejadian-kejadian agar menciptakan lingkup keseluruhan dan kompleks yang bias disajikan melalui kata-kata, baik diperoleh dari narasumber maupun dari segi alamiah (Kharuddin, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

International Monetary Fund (IMF)

Ketika berakhirnya saat masa perang dunia yang Ke-Dua Dalam ketentuan standar moneter Internasional para pengemuka aturan-aturan ekonomi negara mempersoalkan kembali bagaimana membentuk ekonomi dunia setelah peristiwa peperangan di Bretton Woods. Pada perjumpaan tersebut menciptakan kesepakatan dalam kinerja penyembuhan ekonomi dunia dengan melakukan tindakan seperti menurunkan ketentuan berdagang, pembayaran, serta pertukaran nilai yang dapat menghentikan proses perdagangan dunia. Dalam perjumpaan itu diciptakan bersama dalam terbentuknya tiga lembaga internasional salah satunya yaitu, *Internasional Monetary Fund* mempunyai wewenang dalam mengatur aturan-aturan seperti sistem finansial maupun dana global sehingga mereka menyediakan juga pinjaman-pinjaman guna membantu negara yang mengalami masalah keuangan. Kemudian melalui penyuluhan hasil di DPR atau Kongres terciptalah anggota-anggotanya yaitu pada tanggal 1 Maret 1947. Sehingga *Internasional Monetary Fund* merupakan organisasi nasional di dunia sehingga memiliki anggota sebanyak 189 negara (Pamungkas et al., 2019).

Internasional Monetary Fund ialah salah satu lembaga moneter internasional yang berfungsi sebagai salah satu dari dua lembaga ekonomi internasional. Tujuannya adalah untuk menyediakan dana internasional yang sama untuk semua negara. Peranan *Internasional Monetary Fund* ialah guna menyeimbang suatu sistem moneter internasional, serta menjaga keseimbangan nilai tukar, membantu neraca pembelian, Dan serta memberikan penanganan terhadap masalah moneter. *Internasional Monetary Fund* bermaksud

untuk melayani sebagai wakil ekonomi bangsa demi negara. *Internasional Monetary Fund* memiliki strategi unik untuk mengatasi masalah di negara. Selain itu, *Internasional Monetary Fund* mengembangkan dokumen yang dikenal sebagai *Article of Agreement Internasional Monetary Fund* (Hermawandi, 2019).

Sebagai organisasi multilateral, *International Monetary Fund* mengidentifikasi bangsa yang masih krisis dalam keuangan. Guna melindungi stabilitas keuangan supaya tidak terjadi pertumbuhan ekonomi regional dan global. *Internasional Monetary Fund* adalah organisasi konsultan yang bekerja untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengukur risiko yang dihadapi suatu negara ketika kondisi ekonomi terpuruk. Hal ini dilakukan *Internasional Monetary Fund* supaya ekonomi anggota negara tidak berada dititik terendah. Akibatnya, *International Monetary Fund* menyediakan pendanaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Pendanaan ini ditujukan untuk negara-negara berkembang. *Internasional Monetary Fund* memiliki 189 anggota ketika didirikan, jadi dengan bergabungnya suatu negara kedalam keanggotaan *Internasional Monetary Fund*, tanpa disadari negara melepaskan bagian kedaulatan negaranya kepada *Internasional Monetary Fund* (Tarmidi, 2003).

Internasional Monetary Fund memiliki pengaruh yang signifikan terhadap setiap negara, *Internasional Monetary Fund* menawarkan dukungan kepada anggotanya melalui aspek sumberdaya, yaitu melalui keuntungan yang dapat diberikan oleh negara tersebut. Rekomendasi *Internasional Monetary Fund* kepada anggotanya adalah berdasarkan keuntungan ini, yang menimbulkan risiko yang jauh lebih tinggi bagi negara. Selain pinjaman, *Internasional Monetary Fund* juga memberikan himbauan berkualitas tinggi untuk keperluan suatu negara. hal ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis sistem keuangan internasional untuk salah satu anggota, menentukan keuntungan ekonomi negara agar dapat beroperasi secara efisien, dan juga menentukan kepatuhan setiap anggota dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi negaranya merupakan tujuan utama dari *Internasional*

Monetary Fund.

Selain melakukan penelitian pada negara tertentu, *Internasional Monetary Fund* juga melakukan penelitian pada global, regional, serta kebijakan ekonomi domestik, serta penelitian tentang kebijakan ekonomi dalam negeri. *Internasional Monetary Fund* dalam pembangunan ekonomi negara terhambat oleh banyaknya negara yang telah dihimpun. *Internasional Monetary Fund* ditugaskan dengan menganalisis situasi ekonomi negara untuk menetapkan garis dasar yang dapat digunakan guna kepentingan yang berbeda untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kualitas ekonomi di negara tersebut. Benar bahwa *Internasional Monetary Fund* belum mampu menyelesaikan masalah, tetapi telah mampu mempererat hubungan antara kedua kelompok tersebut (Aziza et al., 2019).

Analisa Pinjaman Internasional Monetary Fund (IMF) Untuk Perekonomian Indonesia

Indonesia merupakan salah satu dari negara anggota *Internasional Monetary Fund*, terbukti dengan Indonesia menerima pinjaman dari *Internasional Monetary Fund* untuk membantu menstabilkan neraca pembayaran, meningkatkan kekuatan ekspor, dan menjaga kestabilan nilai tukar dan tukar mata uang, serta menjaga kestabilan nilai tukar, serta pinjaman luar negeri yang bergerak dengan cepat. Karena temuan penelitian ini didasarkan pada penelitian non-komisi yang dilakukan oleh *Legler of Intern* selama tahun 1997-1998, jelas bahwa penelitian ini berdampak positif bagi warga negara Indonesia. Namun, berdasarkan data bahwa dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan teori, dapat disimpulkan bahwa tujuan atau hasil penduduk Indonesia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari mereka, dengan pendapatan hasil dari penduduk menjadi terendah. Bisa di lihat dengan terbukti terjadinya fluktuasi rupiah, dan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga perbankan, serta munculnya peningkatan inflasi (Sofyan & Yogyakarta, 2022).

Ketika masa Presiden Soekarno menjabat, *Internasional Monetary Fund* terus mendukung stabilitas keuangan dan moneter Indonesia.

Sehingga perwakilan *Internasional Monetary Fund* pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 1962 (Nugraha, 2019). Ketika saat masa Presiden Soekarno berhenti, Presiden Soeharto menjabat, Indonesia masih juga memiliki banyak hutang luar negeri. Sehingga Indonesia juga semakin banyak hutang terhadap luar negeri (Junaedi, 2018). Meski pada saat itu persepsi masyarakat Indonesia terhadap hutang sedikit menurun, namun hasilnya secara keseluruhan terhadap pergantian presiden tersebut hutang negara ke luar negeri tidak berubah, sejak krisis ekonomi 1997-1998 pemerintahan dari orde lama ke orde baru tidak berubah (Tarmidi, 2003). Ditambah lagi dengan suka berhutang, dan berupaya dalam melakukan pembelaan dengan bantuan struktur yang disesuaikan di luar negeri. Masih banyak ketidakpastian tentang masa depan negara, dan ini termasuk fakta bahwa banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dan korupsi terhadap hasil hutang tersebut. Sehingga pemerintah Indonesia mampu mencapai peningkatan yang signifikan dalam hutang luar negerinya (Hamid, 2000).

Krisis ekonomi melanda negara Indonesia yang saat itu pemimpin presiden Soeharto, tidak ada pilihan lagi mereka berhutang lagi guna menanggulangi krisis moneter dan perekonomian kepada *Internasional Monetary Fund*. Di masa itu nilai uang rupiah jatuh kemudian dilanjutkan dengan merosotnya pasar modal. sehingga pada 31 oktober tahun 1997, *Internasional Monetary Fund* secara resmi membantu dengan nilai \$40 Milliar guna membantu memulihkan perekonomian, dan \$45 Milliar dalam bentuk ganti rugi atas perpindahan ekonomi. Ekonomi Indonesia sudah mengalami turunan dengan drastis sekitar 4,91% pada tahun 1997, sehingga terus terjadi turunan pada saat tahun 1998 terjadi turunan dengan angka 13,68%. *Internasional Monetary Fund* terus membantu Indonesia dengan memberikan dana terus-menerus yang dibutuhkan negara, dengan harapan ekonomi pulih. namun nyatanya hutang semakin membengkak. Bantuan yang diberikan *Internasional Monetary Fund* tidak juga memberikan dampak positif.

Semakin Banyak negara di dunia terkhusus negara berkembang yang dibantu oleh *Internasional*

Monetary Fund, namun tidak ada juga yang mendapatkan hasil maksimal. *Internasional Monetary Fund* malah menjadi faktor sebab timbulnya krisis berkepanjangan, bisa dipastikan bahwa *Internasional Monetary Fund* gagal dalam membantu krisis moneter di Indonesia. *Internasional Monetary Fund* yang gagal di Indonesia ditimbulkan karena *Internasional Monetary Fund* memaksa pengetatan kebijakan fiskal. Hal tersebut menyebabkan dalam negara berkembang maka akan terjadinya peningkatan surplus untuk membayar beban dalam kenaikan hutang, ini akan menimbulkan kondisi ekonomi yang sudah buruk semakin buruk (Khadijah, 2014). Dalam hal ini bahwa bantuan *Internasional Monetary Fund* kepada Indonesia cukup besar, sehingga Indonesia harus menerima macam persyaratan pinjaman yang disodorkan oleh *Internasional Monetary Fund* dengan menandatangani *letter of intent* antara pemerintah Indonesia dengan *Internasional Monetary Fund* (Surya, 2018). Maka prosedur kenyataan bahwa pemerintah Indonesia menciptakan sistem hukum atau ketentuan yang tidak wajar, contohnya Indonesia wajib menerapkan langkah-langkah membuat undang-undang anti-monopoli, salah satu rekomendasi yang paling penting terhadap prosedur *Internasional Monetary Fund* tersebut (Suryokumoro et al., 2017).

Internasional Monetary Fund mengincar Indonesia melalui ideologi imperialisme dan globalisasi, yang ditandai dengan pengejaran suatu tujuan melalui perolehan pengetahuan tentang bangsa lain yang harus dimiliki oleh pemerintahan saat ini, pertumbuhan ekonomi era sebelumnya juga terpengaruh. Selain itu, *Internasional Monetary Fund* membantu Indonesia dalam memprivatisasi Badan Usaha Milik Negara saat itu. Kemungkinan Badan Usaha Milik Negara akan diprivatisasi di masa mendatang. *International Monetary Fund* juga memberikan bantuan kepada masyarakat sektor pekerjaan umum dalam jangka pendek untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek pekerjaan umum dan penyediaan proyek pekerjaan umum, seperti Bahan Bakar Minyak, dan lain-lain. Prosedur ini dilakukan dalam rangka memberikan subsidi kepada masyarakat umum. Sebagai bagian dari

subsidi ini, karena kalau tidak rakyat akan marah dan memberontak bahkan bisa saja melakukan demo dengan cara yang sangat besar untuk menuntut haknya. Dalam hal semakin sulit Indonesia terhadap melunasi hutang luar negerinya. Sering kali Indonesia membayar hutang dengan cara berhutang kembali, disebabkan karena kewajiban dalam pembayaran cicilannya, sebab jikalau terlambat membayarkan hutang tersebut akan ditakutkan bunga akan semakin membengkak tiap tahunnya. *Internasional Monetary Fund* bertekad menekan Indonesia agar mereka membuat aturan penurunan nilai uang dengan tujuan agar Indonesia tidak bisa membayar hutang kepada *Internasional Monetary Fund* (Harthanti & Nuryana, 2018).

Namun, selama Masa jabatan BJ Habibie sebagai presiden sempat berbenturan dengan Bank Bali. Akibat rekomendasi *Internasional Monetary Fund* agar masyarakat tidak mengetahui audit Bank Bali. Karena BJ Habibie mengalami permasalahan dengan Bank Bali mengakibatkan ia lengser dari jabatannya. Setelah Presiden BJ Habibie lengser, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengambil alih sebagai presiden, namun sesuai fakta bisa dilihat bahwa Gus Dur juga ikut bekerja sama dengan *Internasional Monetary Fund*, terbukti dengan fakta bahwa melakukan kerja sama pada *Internasional Monetary Fund* pada Januari 2000 hingga Desember 2002. Pada masa Gus Dur dia mendirikan Pemerintahan sebagai sarana permasalahan Governance, sehingga menyebabkan Gus Dur turun dari jabatannya. Setelah Gus Dur menyelesaikan kepemimpinannya, Kemudian Megawati diberi tugas, Megawati mampu memperbaiki situasi keuangannya pada masa kepresidenannya dengan bekerja sama dengan *Internasional Monetary Fund*. Itu didasarkan pada program *Internasional Monetary Fund*, yang telah selesai.

Sebagai bagian dari program *Internasional Monetary Fund*, megawati masih hidup dan sehat. Namun, Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengalami krisis keuangan yang dimulai pada tahun 1997 dan berlangsung hingga tahun 1998. Akibatnya, Indonesia telah menerima sebagian besar pendanaan dan bantuan dari *Internasional Monetary Fund* kemudian pada Juli

2003, negara dengan resmi memberitahukan bahwa untuk tidak lagi melanjutkan program bantuan *Internasional Monetary Fund*. Awalnya, pada tanggal 15 September 2003, pemerintah menerbitkan buku putih atau paket kebijakan ekonomi dan dokumen pasca *Internasional Monetary Fund*. Kebijakan artikel ini dapat dipublikasikan atau diteruskan kepada anggota masyarakat umum. Setelah masa jabatan megawati berakhir. Berlanjut kepada masa Susilo Bambang Yudhoyono, selanjutnya pada saat pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia masih berencana untuk mempromosikan politik luar negeri yang lebih aktif dan terkemuka. Pola dengan arahan Susilo Bambang Yudhoyono, hal ini dilakukan agar Indonesia dapat memantapkan pijakan dalam urusan internasional sehingga dapat berpartisipasi dalam urusan internasional dan berkontribusi pada stabilitas global.

Pada saat itu cadangan devisa pemerintah Indonesia lebih dari cukup untuk mengamankan pelunasan pinjaman kepada *Internasional Monetary Fund* untuk Indonesia. Dalam hal ini, transaksi pertama terjadi pada bulan Juni 2006 dan biaya 3,75 juta AS. Pembayaran kedua dilakukan saat 5 Oktober 2006, dan totalnya \$3,2 juta AS. jadi dengan lunasnya nya hutang luar negeri Indonesia terhadap *Internasional Monetary Fund*, membuat Indonesia tidak mempunyai pinjaman lagi. Jadi hubungan Indonesia dengan *Internasional Monetary Fund* sekarang ini hanya dengan batasan anggota saja (Widiatmaja & Albab, 2020). Setelah Indonesia berjuang melunasi hutangnya terhadap *Internasional Monetary Fund*, namun kenyataannya Indonesia kembali lagi meminta bantuan dan berhutang lagi. Ketika Presiden Jokowi Widodo menghimbau bahwa ia menegaskan kembali ia meminta bantuan kepada *Internasional Monetary Fund* saat wabah Covid-19 pertama kali terjadi di Dunia, Indonesia merupakan salah satu dari negara yang terkena wabah Covid-19. *Internasional Monetary Fund* akan menerbitkan *Special Drawing Rights* ke sejumlah negara mulai Agustus 2021, termasuk Indonesia. *Internasional Monetary Fund* pastikan bahwa bantuan kali ini berbeda dengan biasanya, *Special Drawing Rights* saat adalah bantuan, bukan termasuk ke dalam pinjaman yang

pelunasannya ditentukan, tetapi pengembalian nya tidak memiliki batas waktu pengembaliannya.

Special Drawing Rights saat ini adalah dana yang bisa digunakan guna menambah cadangan devisa bersama. Dengan keuntungan negara tersebut dapat membayarnya Ketika negara sudah memiliki cukup dana untuk memulangkannya. *Special Drawing Rights* merupakan upaya *Internasional Monetary Fund* dalam aksi untuk menunjang kekebalan serta keseimbangan perekonomian yang mencakup negara-negara dunia tidak terlepas pula dari keanggotaan *Internasional Monetary Fund* itu sendiri (Widiatmaja & Albab, 2020).

5. KESIMPULAN

Internasional Monetary Fund ialah bentuk organisasi yang bersifat internasional sebab mereka mampu menangani permasalahan-permasalahan perekonomian di dunia ini, dengan cara membantu negara yang sedang mengalami masalah keuangan, mereka berupaya menyodorkan dana segar guna pemulihan masalah keuangan tersebut. *Internasional Monetary Fund* di katakana sangat berdampak terhadap negara Indonesia, di sebabkan banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada *Internasional Monetary Fund* terhadap Indonesia, baik pada saat krisis moneter maupun hingga sampai saat sekarang ini. Namun apabila dikaji kembali bantuan *Internasional Monetary Fund* hanya sementara saja bisa dirasakan oleh negara dampak positifnya disebabkan negara berkembang seperti Indonesia tidak cocok untuk meminta bantuan kepada *Internasional Monetary Fund* guna menunjang perekonomian di negara tersebut merupakan sistem Internasional yang mengatasi masalah keuangan. Karena nyatanya bantuan yang diberikan *Internasional Monetary Fund* hanya menambah bencana negara, terkhusus untuk masyarakat miskin. Sebab Indonesia terus menerus melakukan kegiatan kerjasama bersama *Internasional Monetary Fund*, karena masih belum mampunya negara melunasi hutang tersebut, dan terkesan tindakan negara seperti (gali lubang dan tutup lubang) saja dalam membayar dan melunasi hutang-hutangnya.

Hingga pada pemerintahan presiden Susilo

Bambang Yudhoyono, negara mampu melunasi hutangnya terhadap *Internasional Monetary Fund*. Dengan terputusnya hutang Indonesia terhadap *Internasional Monetary Fund* tersebut maka itulah awal mula perekonomian Indonesia agar bisa menjadi lebih baik lagi. Namun disayangkan, pada pemerintahan Indonesia saat sekarang ini yaitu presiden Jokowi Widodo Indonesia kembali berhubungan dan meminta bantuan kembali kepada *Internasional Monetary Fund* disebabkan Indonesia termasuk dalam negara yang terkena wabah Covid-19, pada saat itu perekonomian Indonesia mengalami penurunan sehingga membutuhkan dana segar dengan harapan agar perekonomian di Indonesia tersebut dapat meningkat pulih. Serta ada kebijakan baru yang di berikan *Internasional Monetary Fund* yaitu *Special Drawing Rights*, merupakan upaya *Internasional Monetary Fund* dalam aksi untuk menunjang kekebalan serta keseimbangan perekonomian yang mencakup negara-negara dunia tidak terlepas pula dari keanggotaan *Internasional Monetary Fund* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, A. N., Fathana, A., & Yulianto, A. F. (2019). Analisis Peran IMF Terhadap Fenomena Inflasi Tahun 1997-1998. *Nation State Journal of International Studies*, 2(1), 1-15.
- Gunawan, Y. (2021). *Hukum Internasional: Sebuah Pendekatan Modern*.
- Hamid, S. E. (2000). *PEREKONOMIAN INDONESIA MASALAH DAN KEBIJAKAN KONTEMPORER*.
- Harthanti, D., & Nuryana. (2018). Pengaruh IMF (*Internasional Monetary Fund*) Dalam Pengambilan Kebijakan Ekonomi- Politik Indonesia Pada Masa Pemerintah Orde Baru (1967-1974). *Jurnal of Studies International*, 3(1), 1-80.
- Hermawandi, Y. (2019). Ekonomi Politik Neoliberalisme *International Monetary Fund* (IMF). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 237-254.
- Junaedi, D. (2018). HUBUNGAN ANTARA HUTANG LUAR NEGERI DENGAN PEREKONOMIAN DAN KEMISKINAN: KOMPARASI ANTARA ENZIM

- PEMERINTAHAN. *Jurnal Symposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 23-56.
- Khadijah, S. (2014). IMF DALAM PERSPEKTIF TEORI PERUBAHAN SOSIAL. *Jurnal Makna*, 4(2), 20-50.
- Kharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1-8.
- Lestari, D. S., & Ainulyaqin, M. (2022). Industrialization Program To Overcome Economic Gaps In Society. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 1(1), 96-117. <https://doi.org/10.58223/icie.v1i1.109>
- Muhammad Rafi Darajati. (2020). Eksistensi Imf, World Bank, Ilo Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional. *Jihk*, 5(2), 44-58. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.44>
- Nugraha, G. K. (2019). PENGARUH RESPON IMF TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAHAN INDONESIA. *Jurnal of Internasional Relation*, 4(3), 10-30.
- Pamungkas, M. L., Dyah, R., & Rahayu, S. (2019). Perbandingan Sistem Pinjaman IMF Dan Brics New Development Atas Hegemoni Amerika Serikat. *Jurnal of Studies International*, 2(2), 134-150.
- Sofyan, M. F., & Yogyakarta, U. M. (2022). Peran imf dalam perekonomian indonesia. *J.Illmu Dan Budaya*, 1(June), 0-16.
- Surya, A. A. (2018). UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAHAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN DAMPAKNYA. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 110-170.
- Suryokumoro, H., Sukarmi, & Hikmatul, U. (2017). Model Pengawasan Penggunaan Pinjaman Luar Negeri: Studi World Bank Dan IMF di Indonesia. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(2), 113-180.
- Tarmidi, L. T. (2003). Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran Imf Dan Saran. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 1(4), 1-25. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i4.183>
- Widiatmaja, A., & Albab, U. (2020). INDONESIA DI ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO(SBY) DAN JOKO WIDODO: KEBIJAKAN LUAR NEGERI DI TENGAH DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS REGIONAL. *Jurnal Politicia*, 10(1), 1-250.